



IMPLEMENTASI KOMITMEN KTT G-20

Humphrey Wangke*)

Abstrak

KTT G-20 yang berlangsung di Hangzhou, Tiongkok, berakhir dengan dikeluarkannya Konsensus Hangzhou yang berisi komitmen negara-negara peserta untuk memulihkan perekonomian dunia yang dirasakan mulai melambat sejak tahun lalu. Namun, negara-negara G-20 seringkali sulit mengimplementasikan komitmen tersebut sehingga menimbulkan keraguan akan manfaat G-20. Indonesia menyatakan komitmennya untuk membuat perekonomian dunia lebih transparan tetapi negara-negara maju harus memulainya terlebih dahulu.

Pendahuluan

Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hangzhou, Tiongkok, berakhir tanggal 5 September 2016 dengan menghasilkan Konsensus Hangzhou yang diharapkan dapat menciptakan perekonomian dunia yang inovatif, konektif, dan inklusif. Konsensus ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kelambatan ekonomi yang terjadi secara global. Meskipun tidak ada aturan mengikat tetapi konsensus tersebut diharapkan ditaati agar tercipta pertumbuhan ekonomi global yang lebih berkualitas.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang menjadi tuan rumah mengatakan bahwa negara-negara G-20 harus mampu merepresentasikan solidaritas dan kerja sama yang saling menguntungkan yang dapat dicapai melalui koordinasi antarnegara anggota secara intensif. KTT G-20 itu menyampaikan pesan yang sangat jelas tentang pentingnya komitmen global dalam menyinergikan kebijakan fiskal,

moneter, dan reformasi struktural untuk memperbaiki perekonomian dunia. Hal ini menjadi pertanda bahwa negara-negara di dunia lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya daripada kepentingan bersama.

Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga terwujudnya sistem perekonomian dunia yang terbuka dan kompetitif. Namun di sisi lain, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengingatkan negara-negara lainnya agar tetap mempertahankan komitmennya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dunia 2 persen pada tahun 2018. Target pertumbuhan 2 persen disepakati dalam pertemuan G-20 di Brisbane, Australia tahun 2014. Namun setelah dua tahun berlalu, belum terlihat tanda-tanda bahwa kinerja perekonomian negara-negara G-20 akan mengarah pada pertumbuhan 2 persen. Karena itu dalam pertemuan di Hangzhou,

*) Peneliti Utama Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: dhanny_2000@yahoo.com



negara-negara G-20 menyetujui, di dalam komunikasi bersama yang dikeluarkan pada akhir pertemuan, bahwa semua sarana yang ada, seperti moneter, fiskal, dan reformasi struktural harus digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk tetap menjadikan perekonomian Indonesia terbuka, kompetitif, dan inklusif sehingga mampu bersaing dengan negara lainnya.

Tantangan Global G-20

Hasil yang dicapai dalam KTT G-20 di Hangzhou adalah konsensus. Oleh karena itu, tantangan pertama yang dihadapi oleh negara anggotanya adalah mengimplementasikannya agar perekonomian dunia menjadi lebih inklusif, inovatif, dan efisien. Tanda-tanda G-20 sering kesulitan mengimplementasikan komitmennya terlihat dari fenomena yang terjadi dalam 6 tahun terakhir ini, yaitu perekonomian global bukan direvisi ke atas melainkan selalu ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin G-20 gagal mencapai kesepakatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, baik, dan inklusif.

Forum pertemuan G-20 selama ini belum bisa menciptakan kepercayaan dan mempertebal harapan bahwa kerja sama ekonomi bukanlah suatu retorika politik. Karena itu, kesepakatan haruslah sebuah kebijakan yang mampu menyejahterakan rakyat di setiap negara. Namun kondisi semacam ini sulit tercapai karena setiap negara anggota selalu menghadapi persoalan internal yang cukup rumit yang seringkali tidak berkaitan dengan masalah ekonomi. Perancis, Jerman, AS, dan beberapa negara anggota lain saat ini akan menghadapi pemilu. Situasi politik seperti pemilu ini berpeluang menunda implementasi konsensus karena hasil pemilu justru menciptakan ketidakadilan di negara-negara yang bersangkutan. Sementara rakyat di sejumlah negara lainnya yang bukan anggota G-20 merasa tidak puas terhadap globalisasi yang dirasakan belum inklusif terutama terhadap masyarakat bawah.

Berdasarkan hal tersebut, para pemimpin G-20 di Hangzhou sepakat mendukung sistem perdagangan multilateral dan menolak proteksionisme. Mereka juga sepakat meningkatkan inovasi dan memperkuat sistem keuangan global sebagai langkah kerja pertama

untuk meningkatkan investasi multilateral. Segala macam bentuk proteksionisme di bidang investasi dan perdagangan akan dihilangkan. Pada bagian lain, negara-negara G-20 juga menjanjikan untuk tidak menurunkan mata uangnya untuk kepentingan memicu ekspor. Serangkaian pendekatan ini diharapkan implementatif sehingga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi negara-negara G-20 dan negara-negara lainnya di dunia.

Tantangan lainnya yang tengah dihadapi negara anggota G-20, adalah rendahnya tingkat pertumbuhan perdagangan global empat tahun terakhir yang bertengger pada angka tiga persen. Selain memperkuat perdagangan global, G-20 juga akan membangun mekanisme yang kuat dalam investasi global guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lemah. Berdasarkan data statistik Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tingkat pertumbuhan global terus mengalami penurunan signifikan sejak 2008 yang rata-rata mencapai tujuh persen per tahun.

Penurunan terjadi sejak tahun 2009 hingga 2015, yakni sekitar tiga persen per tahun. Terkait dengan hal ini, Menteri Perdagangan G-20 berusaha merumuskan strategi pertumbuhan perdagangan global. Dari sisi keuangan, negara-negara G-20 terus berupaya agar mata uang tetap stabil di tengah situasi perekonomian dunia yang tidak menentu sehingga kegiatan perdagangan dan investasi tidak terganggu. Gejolak mata uang dikhawatirkan akan melemahkan peningkatan pertumbuhan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi hubungan diplomasi antarnegara yang memang sering terganggu karena masalah politik dan keamanan.

Menghindari Pembicaraan Masalah Politik

Situasi ekonomi global saat ini masih dalam kondisi lesu dan tidak menentu, karena itu Tiongkok berusaha mengarahkan diskusi pada situasi ekonomi global tersebut. Bagi Tiongkok, KTT G-20 merupakan forum bagi semua negara G-20 dan organisasi internasional terkait untuk fokus mencari solusi atas risiko dan tantangan ekonomi global yang masih lesu serta melambat pertumbuhannya.

Selaku tuan rumah, pemerintah Tiongkok berusaha menghindari munculnya diskusi tentang isu-isu politik dan keamanan

yang sangat sensitif seperti friksi tajam atas klaim teritorial di Laut Tiongkok Selatan, sengketa dengan kekuatan regional seperti Korea Selatan dan Jepang, atau masalah internalnya sendiri seperti pembungkaman terhadap perbedaan pendapat di dalam negeri.

Laut Tiongkok Selatan telah menjadi isu yang sangat sensitif karena panel arbitrase internasional di Den Haag Belanda pada bulan Juni lalu telah menggugurkan klaim Tiongkok atas hampir seluruh perairan. AS dan negara lainnya telah meminta Tiongkok untuk menghormati putusan itu. Namun Tiongkok menolak putusan itu dan bertekad untuk terus mengembangkan pulau-pulau buatan di kepulauan Spratly yang dipersengketakan. Sementara hubungan dengan Jepang tetap tegang karena klaimnya atas pulau berpenghuni di Laut Tiongkok Timur tetap dikendalikan oleh Jepang. Hubungannya dengan Korea Selatan yang sebelumnya hangat menjadi dingin karena Korea Selatan telah menggelar sistem pertahanan udaranya.

Melalui KTT G-20, Tiongkok nampaknya justru ingin memperbaiki citranya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan kekuatan yang tumbuh dalam diplomasi global. Tiongkok justru mempertegas posisinya sebagai bangsa yang bertanggungjawab yang dukungannya sangat penting untuk memecahkan persoalan dunia. Karena itu, selama KTT berlangsung, Tiongkok menghindari isu-isu kontroversial dan tetap fokus pada peran ekonomi yang menjadi inti KTT. Selama KTT berlangsung, Tiongkok lebih menampilkan sosok negara yang sedang berjuang mengatasi masalah perubahan iklim, motor pembangunan di Asia melalui strategi *One Belt One Road*, pembangunan infrastruktur di Asia melalui *Asian Infrastructure Investment Bank*, dan sebagai negara terdepan dalam mempraktekkan perdagangan bebas global di tengah bangkitnya nasionalisme ekonomi di Eropa dan kawasan lainnya.

Tiongkok berharap, *pertama*, KTT G-20 dapat berperan lebih terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang lebih stabil. *Kedua*, memperkuat kerja sama dan kemitraan internasional di bidang ekonomi untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan risiko ekonomi dunia yang masih mengalami kelesuan serta tekanan. *Ketiga*, inovasi membangun kelembagaan dan menciptakan landasan mekanisme bersama, untuk penanganan krisis dalam pemerintahan jangka panjang.

Ketidakjelasan substansi pembicaraan dan kerja sama G-20 mengakibatkan partisipasi Indonesia di G-20 menjadi perdebatan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan Pakar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan Indonesia di G-20 dan keluar dari forum tersebut jika tidak bermanfaat bagi kepentingan Indonesia.

Posisi, Peran, dan Manfaat bagi Indonesia

Pada dasarnya posisi Indonesia di G-20 sangat jelas, yaitu mendukung secara penuh wadah formal yang merangkul negara maju dan berkembang. Keterlibatan Indonesia di forum ini memberikan peluang Indonesia untuk *go international*. Selain itu bagi Indonesia, G-20 bukan hanya forum ekonomi melainkan juga forum pertemuan bagi beragam budaya dan peradaban, dan Indonesia mengambil peran sebagai jembatan antar-perbedaan tersebut.

Dari segi ekonomi, Indonesia dapat dikatakan memiliki daya saing nasional yang masih lemah dan perlu ditingkatkan dengan maksimal. Salah satu tujuan Indonesia ikut serta dalam forum G-20 adalah untuk meningkatkan kemampuan saingnya di pasar internasional. Bagi Indonesia, forum G-20 penting untuk mencari mitra dagang dan sebagai forum untuk menjaring peluang dan kesempatan kerja sama. Sebagaimana disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indonesia seharusnya bangga menjadi bagian G-20, serta dapat memberikan masukan mengenai bagaimana ekonomi internasional dapat mendorong perkembangan negara berkembang seperti Indonesia.

Selain itu, menjadi anggota G-20 membantu Indonesia mendapatkan posisi tawar yang akan diperhitungkan masyarakat Internasional. Kemudian, alasan penting lain sekaligus manfaat yang di dapat Indonesia dari forum G-20 ini adalah terbangunnya citra Indonesia di mata komunitas Internasional karena Indonesia selalu membangun toleransi dan demokrasi sekaligus menjadi jembatan visi misi yang berbeda antar-negara.

Presiden Joko Widodo telah mengambil manfaat dari KTT G-20 sebagai ajang untuk memperkenalkan posisi tawar dan keterbukaan Indonesia serta kesediaan untuk bekerja sama. Dengan begitu, pertemuan

tersebut akan memberikan citra baik tentang Indonesia, selain juga efisiensi melakukan minimalisasi biaya pertemuan dengan para pemimpin dunia.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja sama mengurangi hambatan tarif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada tahun 2018. Namun di sisi lain, Presiden juga menghendaki agar negara-negara G-20 meningkatkan komunikasi dan menghindari kebijakan ekonomi yang bisa menciptakan dampak negatif dan setiap perekonomian harus mempunyai agenda pertumbuhan yang solid dan inklusif.

Dalam pertemuan di Hangzhou, Presiden Joko Widodo mendesak semua negara G-20 agar mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan serta mengimbau setiap negara untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain. Penegasan seperti ini penting dilakukan karena dunia sedang menghadapi tantangan sulit dalam pemulihan ekonomi. Situasi ekonomi global saat ini sedang belum stabil, begitupun situasi geopolitik yang belum menentu. Karena itu, negara-negara G-20 diminta berani melakukan reformasi sistem keuangan internasional yang adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Harapan

Ditengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi dunia dan ketidakjelasan validitas kerja sama G-20, negara-negara anggota harus mampu meningkatkan komunikasi dan menghindari kebijakan ekonomi yang menciptakan dampak negatif. Selain itu, setiap kebijakan ekonomi harus memiliki agenda pertumbuhan yang solid dan inklusif. Indonesia yakin mampu berperan besar dalam perkembangan ekonomi global. Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara anggota G-20. Karena itu, Indonesia berkomitmen untuk menjaga ekonominya terbuka dan kompetitif.

Indonesia berharap negara G-20 juga berkomitmen untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Salah satunya dengan menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang, terutama di ranah digital. Untuk itu, negara-negara G-20 dapat memberikan asistensi mengurangi kesenjangan digital antara negara maju dan

berkembang, serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan teknologi di antara negara-negara anggota G-20.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu presiden mengajak negara-negara G-20 bekerja sama dengan Indonesia dalam menyukseskan program pembangunan infrastruktur nasional. Saat ini Indonesia sedang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia akan menyambut kerja sama dalam pembangunan infrastruktur dengan negara-negara G-20 lainnya.

Penutup

Tema KTT G-20 di Hangzhou adalah inovasi, interkoneksi, dan inklusif, berdasarkan kebutuhan masing-masing negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih stabil dan berkelanjutan, di tengah situasi yang kurang mendukung. Karena itu semua negara anggota G-20 siap bekerja sama dan menghasilkan langkah konkret bagi perbaikan situasi ekonomi global, dan bagi masa depan masyarakat dunia yang lebih baik.

Penyelenggaraan KTT G-20 di Hangzhou seharusnya menjadi agenda puncak diplomasi tahun ini, yang akan memberikan dampak bukan hanya secara ekonomi saja tetapi juga politik dan sosial bagi masyarakat internasional. Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk menghapus hambatan perdagangan dan investasinya, tetapi sambil mengingatkan agar semua negara di dunia melakukan hal yang sama.

Referensi

- Christ Miller, G-20 Meeting Shows Discord, *The Jakarta Post*, 9 September 2016, hal.6.
- Ganewati Wuryandari, "Expectations of RI's renewed role in G20", *The Jakarta Post*, 6 September 2016, hal. 6.
- "Gagasan Baru dari Hangzhou", *Kompas*, 6 September 2016, hal. 8.
- "Indonesia memiliki Modal Dasar untuk Mengembangkan", *Kompas*, 7 September 2016, hal. 17.
- "RI Fighting Protectionism", *The Jakarta Post*, 5 September 2016, hal. 1.
- "RI Jaga Ekonomi Terbuka", *Media Indonesia*, 5 September 2016, hal. 1.
- "Solusi dari kekuatan Ekonomi", *Kompas*, 5 September 2016, hal. 8.